

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

- Tahun Sidang : 2021-2022  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- : 3  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021  
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Membahas:  
1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2020;  
2. Evaluasi Anggaran Tahun 2021;  
3. RKA K/L Tahun 2022;  
4. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; dan  
5. Isu-isu Aktual lainnya.
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG), Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. 49 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. (Menteri Pertanian);  
2. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian);  
3. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);  
4. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);

5. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sekaligus Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian);
6. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
7. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian);
8. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
9. Ir. Bambang, M.M. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian);
10. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian);
11. Achmad Bakir Pasaman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia  *Holding Company*;
12. Nugroho Christijanto, Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia  *Holding Company*;
13. Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);
14. Karyawan Gunarso, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) hadir secara virtual;
15. Maryono, Direktur Utama PT Pertani (Persero) hadir secara virtual; dan
16. Harry Warganegara, Direktur Utama PT Berdikari (Persero) hadir secara virtual.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2020, Evaluasi Anggaran Tahun 2021, RKA K/L Tahun 2022, Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan Isu-isu Aktual lainnya, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. **Laporan Realisasi Anggaran**
    - 1) Realisasi Pendapatan Negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp999.524.741.071,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh empat juta

tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh satu rupiah) atau mencapai 226,35% dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp441.584.456.000,00 (empat ratus empat puluh satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- 2) Realisasi Belanja Negara 2020 sebesar Rp15.188.739.413.432,00 (lima belas triliun seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) atau mencapai 95,61% dari alokasi anggaran sebesar Rp15.886.240.106.000,00 (lima belas triliun delapan ratus delapan puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta seratus enam ribu rupiah).

**b. Neraca**

- 1) Nilai Aset, sebesar Rp82.127.882.147.729,00 (delapan puluh dua triliun seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
- 2) Nilai Kewajiban, sebesar Rp13.660.811.910,00 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- 3) Nilai Ekuitas, menjadi sebesar Rp82.114.221.335.819,00 (delapan puluh dua triliun seratus empat belas miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

**c. Laporan Operasional**

- 1) Kegiatan Operasional:
  - a) Pendapatan Operasional sebesar Rp528.312.813.407,00 (lima ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus dua belas juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh rupiah).
  - b) Beban Operasional sebesar Rp17.204.254.023.512,00 (tujuh belas triliun dua ratus empat miliar dua ratus lima puluh empat juta dua puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah),

Sehingga terdapat defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp16.675.941.210.105,00 (enam belas triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus lima rupiah).

- 2) Kegiatan Non Operasional terdapat defisit sebesar Rp4.599.268.866.675,00 (empat triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Sehingga mengalami Defisit-LO sebesar Rp21.275.210.076.780,00 (dua puluh satu triliun dua ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus sepuluh juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

#### d. Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas akhir sebesar Rp82.114.221.335.819,00 (delapan puluh dua triliun seratus empat belas miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

2. Komisi IV DPR RI mengkritisi serapan anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2021 yang belum optimal dan meminta Eselon I Kementerian Pertanian yang serapannya masih dibawah 60% segera mengambil langkah-langkah operasional untuk mempercepat penyerapan anggaran. Selanjutnya menindaklanjuti kesimpulan Rapat Kerja tanggal 21 Juni 2021, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyerapan anggaran kegiatan Tahun 2021 serta melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Tahun 2021.
3. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar **Rp14.451.749.428.000,00** (empat belas triliun empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-634/MK.02/2021 dan 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan melakukan pembahasan bersama dengan Eselon I Kementerian Pertanian untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-masing Eselon I pada Rapat Dengar Pendapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian Tahun 2022 sebesar Rp2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus miliar rupiah) dan penjelasan Menu DAK Bidang Pertanian antara lain, pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan jalan pertanian; lumbung pangan masyarakat serta sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. Adapun rinciannya sebagai berikut:
  - a. DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian, sebesar Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar rupiah) di 288 Kabupaten/Kota; dan
  - b. DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian, sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) di 510 Kabupaten/Kota.Selanjutnya akan dilakukan pendalaman dalam rapat selanjutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Ketahanan Pangan merujuk pada terbentuknya Badan Pangan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, yang kemudian akan dibahas pada Rapat selanjutnya.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian terhadap tugas, fungsi dan kewenangan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian merujuk kepada terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Komisi IV DPR RI menilai masih rendahnya serapan pupuk bersubsidi sebesar 52,9%, untuk itu Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan langkah strategis dalam meningkatkan serapan pupuk bersubsidi.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melibatkan PT Pertani (Persero), PT Berdikari (Persero), dan PT Sang Hyang Seri (Persero) dalam mendukung pengembangan bibit, benih dan peternakan dalam negeri.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.15 WIB.

Menteri Pertanian,

Ttd.

**Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**  
A-151